

## Resensi Buku *Negara: The Theater State in 19th Century Bali*

Buku antropolog Amerika Serikat (AS) berjudul *Negara: The Theater State in 19th Century Bali* ini terdiri dari 289 halaman, yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab secara berurutan adalah: *Political Definition: The Sources of Order*. Bab dua berisi tentang *Political Anatomy: The Internal Organization of the Ruling Class*; bab tiga *Political Anatomy: the village and the State*; dan bab empat, *Political Statement: The Spectacle and Ceremony*.

Geertz menyoroti keberadaan sebuah kerajaan kecil di selatan Bali yang dihadapkan pada teori politik Machiavelli dan Hobbes hingga Marx. Mengapa Geertz tertarik mengupas sebuah kerajaan kecil di Bali pada kurun waktu itu, karena Indonesianis AS itu ingin melihat relasi antara kekuasaan dalam sebuah negara dengan budaya setempat. Seperti, bagaimana relasi yang dibangun antara pemerintah yang seringkali “merekpresentasi” negara dengan berbagai ritual yang marak dilakukan di Bali. Apakah berbagai tradisi dan ritual kerajaan di Bali tersebut merupakan representasi sebuah tradisi budaya politik di Indonesia?

Walaupun Geertz mencermati dinamika pengorganisasian kerajaan Bali pada tahun 1891-1906, namun pendekatan yang dilakukan bukankah historis, melainkan pendekatan etnografi, seperti yang lazim dilakukan para antropolog.

Ia membedakan tiga pengertian mengenai negara (*state*). *Pertama*, negara yang berarti status, tingkat, atau posisi. *Kedua*, *stateliness* yang berarti kejayaan, kemegahan, kemuliaan, dan martabat. *Ketiga*, *statecraft* yang berarti penguasaan, penaklukan, atau rezim (*page 121*).

*Theatre state* adalah konsep negara klasik di Asia Tenggara yang tidak mendasarkan diri pada pengertian *statecraft* melainkan lebih mengandalkan pengertian *stateliness*. Negara bukan penguasaan langsung melainkan

penguasaan simbolik lewat perayaan, pameran kebesaran raja, dan negara. Dalam pengertian ini, negara tidak menjadi kaya karena melakukan lebih banyak penaklukan. Sebaliknya dengan menunjukkan dan memamerkan kebesaran raja dan negara, dan kemudian memperluas dan memperbanyak perayaan itu, negara justru telah melakukan penaklukan dan penguasaan karena dimana kebesaran raja dan kejayaan suatu neg dirayakan, disana kebesaran dan kemegahan negara dihadirkan.

Konsep *theatre state* lebih jauh pengertiannya didukung oleh paham pusat *exemplary center*. Menurut paham pusat *exemplary* ini, suatu negara atau kerajaan adalah tiruan dari ibukota, sedangkan ibukota menjadi tiruan istana yang kembali berpusat pada diri raja. Dengan kata lain, raja adalah lambang untuk istana, seperti halnya istana lambang ibukota, demikian pula ibukota adalah lambang negara.

Adapun cara untuk merayakan dan menegaskan sifat dan makna tiap lambang melalui ritus. Lalu, mengapa ritus menjadi bermakna? Menurut Geertz, kebudayaan atau nilai-nilai budaya bergerak secara vertikal dari atas ke bawah, dan secara horizontal dari pusat ke pinggiran atau *periphery*.

Sebaliknya, organisasi politik atau akumulasi kekuasaan bergerak secara vertikal dari bawah keatas dan secara horizontal dari pinggiran ke pusat, gerak nilai-nilai budaya dari atas ke bawah berlangsung menurut pola status menurun atau *sinking status pattern* (hal 16). Berdasarkan anggapan bahwa manusia diturunkan dari dewa-dewa dan bukan secara genealogis, melainkan dalam arti bahwa manusia menerima martabat lebih rendah dari dewa- dewa. Menurunnya martabat ini berlangsung pada berbagai tingkat dan status berdasarkan sistem tingkatan yang sangat kompleks, yang secara rinci ditandai dengan gelar-gelar. Sistem kelompok gelar di Bali ini mirip dengan sistem kasta di India. Sistem ini, setidaknya secara teoritis, memberi suatu status gelaran yang tegas, dan bagi setiap orang, tidak bisa diubah di dalam suatu hirarki penghormatan kepada

setiap orang atau keluarga di Bali. Setiap kedudukan orang yang ditandai oleh gelarnya, merupakan cerminan dari sejarah mitis garis keturunan orang itu yang menurun dari tingkat dewa yang mulia ke tingkatnya yang sekarang ini. Perbedaan kualitatif mengenai prestise dari berbagai garis keturunan adalah akibat dari perbedaan tingkat penurunan mereka dari tingkat dewa; mereka tidak semuanya turun ke tingkat yang sama. Berbeda dengan kasta di India, dimana tingkat mereka bukanlah akibat dari perilaku mereka dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya melainkan sebagai akibat dari takdir historis.

Secara horizontal nilai-nilai budaya bergerak dari pusat ke pinggiran menurut pola pusat eksemplaris. Dalam paham ini, pusat bahkan menjadi titik pusat, pusat juga merupakan penjelmaan sempurna dari nilai-nilai budaya, dengan akibat bahwa bagian diluar pusat hanya memiliki nilai-nilainya sejauh meniru pusat. Sebaliknya, betapa baiknya pinggiran meniru pusat pihak pinggiran tetap suatu tiruan yang kurang sempurna dari pusat.

Dalam praktik kekuasaan di Bali abad 19, berarti pusat semua nilai, kebesaran dan kesempurnaan adalah dewa, dan kemudian menjelma sebagai diri raja sebagai tiruan syiwa. Selanjutnya, raja menjelma kedalam negara yang sekaligus tiruan raja, dan kemudian berturut-turut raja menjelma ke dalam masyarakat dan masyarakat menjelma dalam individu. Adapun cara untuk meniru pusat adalah melalui teater atau drama, sehingga politik pada akhirnya berarti meniru pusat. Sedangkan berpolitik berarti menjelmakan kekuatan pusat ke dalam tiruannya melalui perayaan dan pendramaan sifat-sifat pusat dalam teater. Demikian bisa dikatakan bahwa suatu perayaan dan pesta tidak hanya merayakan kebesaran dan kekuatan politik, melainkan perayaan itu sendiri adalah politik, karena pesta itu menjelmakan kekuatan pusat dalam dirinya.

Geertz mencoba menggambarkan bahwa negara Bali sebenarnya dijalankan dengan setengah-setengah dan ragu-ragu oleh raja-rajanya. Relasi kekuasaan yang dibangun raja ditujukan ke arah pertunjukan, upacara, ke arah dramatisasi

di muka umum dari obsesi-obsesi utama budaya Bali; derajat sosial dan kebanggaan status (baca: relasi kekuasaan). Geertz meletakkan dasar awal bagaimana upacara, negara, masyarakatnya kemudian berelasi kuat sampai saat ini dengan kekuasaan yang ada dalam “imaji” masyarakat Bali. Kekuasaan melayani upacara, bukan upacara yang melayani kekuasaan.

Barangkali, tesis Geertz akan lebih diskursif lagi jika dimaknai bahwa upacara dan kekuasaan saling melayani, dan keduanya mempunyai hubungan diskursif yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terkait, mengayomi dan memainkan kekuasaan mereka sendiri-sendiri. Upacara dengan tatanan kosmisnya, dan para pemainnya dengan bayangan kekuasaan.

Pada titik relasi kekuasaan upacara inilah, bagaimana negara atau pemerintah, memainkan relasi kekuasaan. Upacara-upacara di Bali sampai kini melibatkan peran negara. Jadi tidak benar apabila upacara itu murni tatanan harmoni kosmis karena semuanya adalah total relasi.

Salah satu contoh mengenai praktik kekuasaan seperti model diatas adalah dilakukan oleh Orde Baru, terutama ketika dengan cerdas memainkan segala perangkat keras dan lunak kekuasaannya. Terminologi “Bersih Lingkungan” secara cerdas bisa merasuk dalam urat nadi manusia Bali dengan upacara. Meminjam Foucault, usaha yang paling cerdas adalah bagaimana menormalkan relasi-relasi kekuasaan itu.